



HUBUNGAN ANTARA USIA, JENIS KELAMIN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) DENGAN KESEDIAAN MEMBAYAR IURAN BPJS KESEHATAN DI KABUPATEN KUDUS

Anom Dwi Prakoso, Fuad Hilmi Sudasman

Stikes Kuningan

anomdwiprakoso@gmail.com

Abstrak

Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) menjadi sektor angkatan kerja yang paling dominan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Hal ini mengakibatkan susah tercapainya Cakupan Semesta yang ditargetkan oleh Pemerintah. Diresmikannya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan sebesar dua kali lipat dapat menambah keengganan PBPU untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis hubungan usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan terhadap kesediaan membayar iuran BPJS kesehatan. Penelitian *case control* dilakukan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada bulan Januari-Februari 2020. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 100 PBPU bukan peserta BPJS Kesehatan sebagai kelompok kasus dan 100 PBPU peserta BPJS Kesehatan sebagai kelompok kontrol. Variabel independen yaitu usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Variabel dependen adalah kesediaan membayar. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data dengan regresi logistik. Kesediaan membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU meningkat pada usia ≥ 43 tahun ($b=5.03$; $CI\ 95\%= 2.90-6.61$; $p<0.001$), jenis kelamin laki-laki ($b=6.18$; $CI\ 95\%= 3.12-7.19$; $p<0.001$), tingkat pendidikan $\geq SMA$ ($b=3.10$; $CI\ 95\%= 0.96-4.31$; $p=0.002$). Usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan memiliki hubungan signifikan terhadap kesediaan membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU.

Kata Kunci: Cakupan Semesta; Kesediaan Membayar; BPJS Kesehatan; Pekerja Bukan Penerima Upah.



Pendahuluan

Semenjak beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tahun 2014 sampai dengan saat ini, BPJS senantiasa mencatatkan defisit keuangan tiap tahunnya. Salah satu penyebabnya yaitu banyaknya Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dari sektor mandiri maupun informal yang hanya mendaftar pada saat sakit kemudian berhenti membayar iuran sesudah memperoleh pelayanan kesehatan. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau sering dikenal pekerja informal merupakan setiap orang yang bekerja ataupun berusaha atas resiko sendiri. Pekerja Informal di Indonesia masih menjadi sektor yang dominan sebanyak 74,04 juta orang (56,50%) dari total angkatan kerja sebanyak 137,91 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar Pasal 28H Tahun 1945, pemerintah wajib menjalankan jaminan sosial dan kesehatan bagi semua Warga Negara di Indonesia (Pemerintah Indonesia, 1945). Oleh karena itu, demi terselenggaranya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), maka setiap Semua Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal minimal enam bulan di Indonesia harus

mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tidak hanya wajib bagi pekerja formal, begitupun bagi pekerja informal. Bagi pekerja formal, setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh pekerja. Sedangkan pada pekerja informal wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan Kelas berdasarkan manfaat yang diinginkan (Presiden Republik Indonesia, 2020).

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Indonesia masih jauh dari target jika dilihat dari aspek kepesertaannya. Berdasarkan data Dewan Jaminan Sosial Nasional per Oktober 2020, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan sebanyak 223.470.668 jiwa (82%) dari total penduduk di Indonesia sekitar 267 Juta Jiwa. Artinya sekitar 43 juta penduduk di Indonesia belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tidak semua peserta BPJS statusnya aktif membayar iuran secara rutin tiap bulannya. Diketahui sebanyak 25.089.923 jiwa status kepesertaannya tidak aktif. Hal tersebut disebabkan karena peserta sudah tidak terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau karena menunggak pembayaran



iuran BPJS Kesehatan. PBPU atau pekerja informal menjadi sektor angkatan kerja yang paling dominan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Diketahui sebanyak 30,487,891 (44%) pekerja dari total 70.49 juta pekerja sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan (Badan Pusat Statistik, 2020; Dewan Jaminan Sosial Nasional., 2020).

Data kepesertaan BPJS Kesehatan per Oktober 2020 di Jawa Tengah baru mencapai 28,642,960 jiwa (81.87 %) dari total penduduk 34,940,078 jiwa. Sebanyak 10,52 juta (58.49 %) penduduk bekerja pada sektor informal. Diketahui dari total pekerja sektor informal di Jawa Tengah, hanya 3,802,209 (36%) yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Artinya, pekerja sektor informal menjadi sektor yang paling banyak yang belum terdaftar dan belum mengikuti skema jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2020; Dewan Jaminan Sosial Nasional., 2020).

Jumlah cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kudus sebanyak 827,911 jiwa (94%) dari total penduduk sekitar 877,920 jiwa sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan. Masih terdapat sekitar 50,000 jiwa belum mendaftarkan

diri sebagai peserta BPJS Kesehatan. Diketahui jumlah total pekerja sektor informal di Kabupaten Kudus sebanyak 81,531 pekerja, sedangkan pekerja informal yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan sejumlah 31,127 pekerja (38%). Jika dilihat dari data yang ada, kesediaan pekerja informal untuk mengikuti skema jaminan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya ke BPJS masih menjadi masalah tercapainya Cakupan Semesta/ Universal Health Coverage (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2018; Dewan Jaminan Sosial Nasional., 2020).

Kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat yang sebelumnya sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung setelah mengabulkan judicial review Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, tampaknya tidak menyulut keputusan Pemerintah untuk tetap menaikkan iuran BPJS dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020. Disaat masih banyaknya pekerja informal yang enggan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta dan membayar iuran BPJS secara rutin, hal ini malah menambah masalah yaitu banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang menunggak berbulan-bulan dengan status kepesertaan yang tidak aktif.



Diketahui per Oktober 2020 sebanyak 25,089,923 peserta statusnya tidak aktif dan pertumbuhan rata-ratanya -67,835 Jiwa (Dewan Jaminan Sosial Nasional., 2020).

Terdapat banyak faktor yang berhubungan dengan kesediaan seseorang untuk membayar iuran asuransi kesehatan secara rutin, salah satunya yaitu karakteristik dari seseorang. Karakteristik digunakan untuk mengetahui keragaman dari seseorang berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, jumlah anggota keluarga dan sebagainya (Dedy et al, 2018; Niha et al., 2019). Menurut Lesmana & Sugiman, (2020), usia seseorang memiliki hubungan terhadap pemilihan kelas iuran perawatan BPJS Kesehatan. Mayoritas orang dengan usia >31 tahun cenderung sudah terdaftar sebagai peserta BPJS dengan memilih kelas 2 dan 3. Sedangkan orang dengan usia <31 tahun cenderung belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Berdasarkan penelitian Yunianti, (2018), jenis kelamin memiliki hubungan yang signifikan terhadap kesediaan membayar iuran JKN pada pedagang di wilayah kerja Puskesmas Simpang Timbangan Kabupaten Ogan Ilir. Jenis kelamin laki-laki meningkatkan peluang lebih tinggi untuk bersedia membayar iuran

JKN dibandingkan jenis kelamin perempuan.

Menurut Nosratnejad et al., (2016), salah satu yang mempengaruhi seseorang untuk bersedia membayar iuran asuransi kesehatan di Negara berpenghasilan rendah dan menengah adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan secara konsisten berkorelasi dengan kesediaan membayar lebih tinggi untuk iuran asuransi kesehatan.

Berdasarkan paparan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan karakteristik Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang meliputi usia, jenis kelamin dan pendidikan terhadap kesediaan membayar iuran BPJS Kesehatan.

Metode

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah analitik observasional dengan pendekatan *case control*. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kudus, Jawa tengah pada Januari-Februari 2020.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam subjek penelitian ini yaitu semua PBPU di Kabupaten Kudus. Adapun jumlah sampel yang digunakan adalah 100 PBPU bukan peserta BPJS Kesehatan sebagai kelompok kasus dan 100 PBPU peserta BPJS



Kesehatan sebagai kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

Variabel Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini adalah umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesediaan membayar.

Definisi Operasional Variabel

Usia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan) ketika ditanya peneliti. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Kode 1 = Tua (\geq Mean/ 43 tahun), 0 = Rendah ($<$ Mean/ 43 tahun).

Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Skala data kontinu, untuk keperluan analisis data diubah menjadi dikotomi. Kode 1 (Laki-Laki), kode 0 (Perempuan).

Tingkat Pendidikan adalah tingkat atau level pendidikan formal yang sudah dilalui masing-masing responden. Alat ukur yang digunakan kuesioner. Skala data kontinu, untuk keperluan analisis data diubah menjadi dikotomi. Kode 1 = Tinggi (\geq SMA), kode 0 = Rendah ($<$ SMA).

Kesediaan membayar adalah kesediaan PBPU membayar iuran BPJS minimal kelas 3 sebesar Rp 25,500 secara rutin tiap bulan. Alat ukur yang digunakan

kuesioner. Skala data kontinu, untuk keperluan analisis data diubah menjadi dikotomi. Kode 1 = Bersedia (\geq Rp 25,500), kode 0 = Tidak Bersedia ($<$ Rp 25,500).

Analisis Data

Analisis univariat menjelaskan tentang gambaran umum data penelitian dan dilakukan pada masing-masing variabel penelitian, yaitu: usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan kesediaan membayar dideskripsikan dalam n dan %.

Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel independen (usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan) terhadap variabel dependen (kesediaan membayar). Uji statistik chi-square dan perhitungan *Odd Ratio* (OR) dengan tingkat kepercayaan/*confidence interval* (CI) sebesar 95%.

Analisis multivariat digunakan untuk melihat hubungan lebih dari satu variabel independen. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi logistik.

Hasil

Analisis Univariat

Deskripsi variabel penelitian secara univariat distribusi subjek penelitian berdasarkan masing-masing variabel penelitian.



Tabel 1. Karakteristik Sampel

Variabel	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Usia		
Muda (<43 Tahun)	94	47.0
Tua (\geq 43 Tahun)	106	53.0
Jenis Kelamin		
Perempuan	92	46.0
Laki-laki	108	54.0
Tingkat Pendidikan		
Rendah (<SMA)	122	61.0
Tinggi (\geq SMA)	78	39.0
Kesediaan Membayar		
Bersedia	100	50.0
Tidak Bersedia	100	50.0

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa PBPU yang berusia muda (kurang dari 43 tahun) sebanyak 94 orang (47.0%), sedangkan PBPU yang berusia tua sebanyak 106 orang (53.0%). Penentuan kategori usia muda dan tua menggunakan Mean/ rata-rata usia subjek penelitian. Diketahui dari hasil analisis data, usia rata-rata subjek penelitian adalah 43 tahun.

PBPU dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 92 (46.0%), sedangkan PBPU dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 108 (54.0%). Diketahui dari hasil analisis data, jenis kelamin laki-laki menjadi subyek penelitian yang dominan.

PBPU dengan tingkat pendidikan rendah sebanyak 122 (61.0%), sedangkan PBPU dengan tingkat pendidikan tinggi sebanyak 116 (58.0%). Penentuan kategori

tingkat pendidikan rendah dan tinggi mengacu program pemerintah wajib belajar 12 tahun. Pendidikan formal seseorang dikategorikan rendah jika (<SMA) sedangkan pendidikan formal seseorang dikategorikan tinggi jika (\geq SMA).

PBPU yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan (\geq Rp 25,500) sebanyak 100 (50.0%), sedangkan PBPU yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan tidak bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan (< Rp 25,500) sebanyak 100 (50.0%). Proporsi yang seimbang antara PBPU yang bersedia dan tidak bersedia membayar iuran BPJS sengaja ditentukan peneliti untuk mengetahui hubungan kausal dengan menggunakan logika terbalik, yaitu menentukan dampak (outcome) terlebih



dahulu kemudian mengidentifikasi penyebab (faktor risiko).

Analisis Bivariat

Analisis secara bivariat menjelaskan tentang hubungan masing-masing variabel

independen terhadap variabel dependen (kesediaan membayar iuran BPJS Kesehatan), metode yang digunakan adalah uji *chi-square*.

Tabel 2. Analisis Bivariat Usia, Jenis Kelamin dan Pendidikan Terhadap Kesediaan Membayar Iuran BPJS Kesehatan

Variabel Independen	Kesediaan Membayar				Total		OR	p
	Bersedia		Tidak		N	%		
	N	%	N	%				
Usia								
Muda (<43 tahun)	14	14.89	80	85.11	94	100	24.57	<0.001
Tua (≥43 tahun)	86	81.13	20	18.87	106	100		
Jenis Kelamin								
Perempuan	6	6.52	86	93.48	92	100	96.23	<0.001
Laki-laki	94	87.04	14	12.96	108	100		
Pendidikan								
Rendah (<SMA)	48	39.34	74	60.66	122	100	3.08	0.002
Tinggi (≥SMA)	52	66.67	26	33.33	78	100		

Tabel 2 menunjukkan bahwa PBPU dengan usia tua meningkatkan peluang lebih tinggi untuk bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan (OR=24.57; $p<0.001$). PBPU dengan jenis kelamin laki-laki meningkatkan peluang lebih tinggi untuk bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan (OR= 96.23; $p<0.001$). PBPU dengan pendidikan tinggi (≥SMA) meningkatkan

peluang lebih tinggi untuk bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan (OR=3.08; $p=0.002$).

Analisis Multivariat

Analisis multivariat digunakan untuk melihat hubungan lebih dari satu variabel independen metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi logistik.



Tabel 3. Analisis Regresi Logistik Usia, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesiediaan Membayar BPJS Kesehatan

Variabel Independen	Koefisien regresi (b)	CI 95%		p
		Batas Bawah	Batas Atas	
Usia (Tua)	5.03	2.90	6.61	<0.001
Jenis Kelamin (Laki-laki)	6.18	3.12	7.19	<0.001
Pendidikan (Tinggi)	3.10	0.96	4.31	0.002

N observasi = 200
Log likelihood = -37.45
p < 0.001

Berdasarkan tabel diatas, usia PBPUs memiliki hubungan signifikan terhadap kesediaan membayar iuran BPJS Kesehatan. PBPUs dengan usia tua atau ≥ 43 tahun memiliki kemungkinan untuk bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan (\geq Rp 25,500) sebanyak 5.03 unit lebih tinggi dibandingkan yang berusia muda <43 tahun dengan nilai statistik ($b=5.03$; CI 95% = 2.90 hingga 6.61; $p < 0.001$).

PBPUs dengan jenis kelamin laki-laki memiliki kemungkinan untuk bersedia membayar Iuran BPJS Kesehatan (\geq Rp 25,500) sebanyak 6.18 kali lebih tinggi dibandingkan yang berjenis kelamin perempuan. Diketahui jenis kelamin PBPUs memiliki hubungan yang signifikan terhadap kesediaan membayar iuran BPJS Kesehatan dengan nilai statistik ($b=6.18$; CI 95% = 3.12 hingga 7.19; $p < 0.001$).

Tingkat pendidikan memiliki hubungan signifikan terhadap kesediaan

membayar iuran BPJS Kesehatan. PBPUs dengan tingkat pendidikan yang tinggi (\geq SMA) memiliki kemungkinan untuk bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan sebanyak 3.10 unit lebih tinggi dibandingkan yang memiliki tingkat pendidikan rendah ($b=3.10$; CI 95% = 0.96 hingga 4.31; $p=0.002$).

Diskusi

Hubungan Usia Terhadap Kesiediaan Membayar Iuran BPJS Kesehatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia memiliki hubungan terhadap kesediaan membayar iuran BPJS Kesehatan. PBPUs yang memiliki usia tua (≥ 43 tahun) meningkatkan kemungkinan untuk bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan sebanyak 5.03 unit lebih tinggi dibandingkan dengan PBPUs yang memiliki usia muda.

Sejalan penelitian yang dilakukan Lesmana & Sugiman, (2020), usia



seseorang mempunyai hubungan terhadap pemilihan kelas iuran perawatan BPJS Kesehatan. Mayoritas orang dengan usia >31 tahun sudah terdaftar sebagai peserta BPJS dan bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan pada kelas 2 dan 3. Sedangkan orang dengan usia <31 tahun cenderung belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Menurut Intiasari et al., (2015), usia pekerja informal memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepesertaan pada skema non PBI mandiri. Pekerja informal yang berusia 36-65 memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mendaftarkan dirinya pada skema non PBI mandiri.

Berdasarkan penelitian Prasetyo (2016), diketahui dari uji statistik diperoleh p value sebesar 0,041, artinya jika terdapat hubungan signifikan antara usia subyek penelitian dengan kepesertaan BPJS Mandiri. Dari hasil analisis diperoleh OR= 3.176 yang artinya subyek penelitian dengan umur dewasa (<65 tahun) mempunyai kemungkinan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan secara mandiri sebesar 3.176 kali dibandingkan umur lanjut usia ≥ 65 tahun.

Hubungan Jenis Kelamin Terhadap Kesiediaan Membayar Iuran BPJS Kesehatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kelamin memiliki hubungan terhadap kesediaan membayar iuran BPJS Kesehatan. PBPU yang berjenis kelamin laki-laki meningkatkan kemungkinan untuk bersedia membayar Iuran BPJS Kesehatan (\geq Rp 25,500) sebanyak 6.18 kali lebih tinggi dibandingkan yang jenis kelamin perempuan.

Menurut Nosratnejad et al., (2016), salah satu yang mempengaruhi seseorang untuk bersedia membayar iuran asuransi kesehatan di Negara berpenghasilan rendah dan menengah adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan secara konsisten berkorelasi dengan kesediaan membayar lebih tinggi untuk iuran asuransi kesehatan.

Menurut Noerdjoedianto (2015), masyarakat dengan tingkat pendidikan SLTA/ sederajat merasa lebih mampu dan mempunyai kesadaran yang lebih tinggi untuk mengalokasikan pendapatannya untuk pembiayaan kesehatan sesuai dengan kemampuannya dengan cara mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Sesuai dengan penelitian Rhoza et al., (2016), kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki berpeluang lebih tinggi dibanding kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan untuk mengambil



keputusan mengikuti jaminan kesehatan nasional dengan mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan.

Menurut Mathauer et al., (2008), jenis kelamin merupakan salah satu bagian dari karakteristik seseorang yang berhubungan dengan kepemilikan asuransi kesehatan sosial pada pekerja sektor informal di Kenya. Laki-laki lebih berpeluang untuk mendaftarkan diri pada skema asuransi kesehatan sosial karena umumnya mereka adalah kepala keluarga yang merupakan tulang punggung keluarga di Kenya.

Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesiediaan Membayar Iuran BPJS Kesehatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat pendidikan memiliki hubungan signifikan terhadap kesiediaan membayar iuran BPJS Kesehatan. PBPUs dengan tingkat pendidikan yang tinggi (\geq SMA) memiliki kemungkinan untuk bersedia membayar iuran BPJS Kesehatan sebanyak 3.10 unit lebih tinggi dibandingkan yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

Sejalan dengan penelitian Prasetyo (2016), diketahui dari hasil analisis statistik didapatkan nilai OR= 2.557 yang berarti subyek penelitian dengan pendidikan

tingkat lanjut ($>$ SMA) memiliki peluang lebih tinggi untuk ikut BPJS Kesehatan mandiri sebesar 2.577 kali dibanding pendidikan tingkat dasar (\leq SMA).

Menurut Nosratnejad et al., (2016), salah satu yang mempengaruhi seseorang untuk bersedia membayar iuran asuransi kesehatan di Negara berpenghasilan rendah dan menengah adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan secara konsisten berkorelasi dengan kesiediaan membayar lebih tinggi untuk iuran asuransi kesehatan.

Sesuai dengan penelitian Kofoworola et al., (2019), bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan kemauan dan kemampuan membayar asuransi kesehatan sosial di Nigeria. Kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan tinggi dan berada di lingkungan perkotaan bersedia membayar lebih tinggi secara nominal untuk premi asuransi kesehatan.

Pendidikan formal merupakan salah satu faktor yang secara signifikan berhubungan dengan kesiediaan untuk membayar. Diketahui dari hasil analisis statistik ($\beta = 3.20$; 95% CI = 1,87, 4,53). Subyek penelitian yang memiliki pendidikan formal lebih baik meningkatkan kesiediaan 3.20 kali lebih tinggi untuk membayar asuransi kesehatan berbasis komunitas rumah tangga pedesaan Distrik



Bugna, Ethiopia Timur Laut. Pendidikan formal yang lebih baik menentukan pemahaman tentang keuntungan melakukan pembayaran asuransi secara teratur untuk menghindari risiko bencana pengeluaran medis pada saat sakit (Minyihun et al., 2019).

Kesimpulan

Usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan memiliki hubungan signifikan terhadap kesediaan membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU. Kesediaan membayar iuran BPJS Kesehatan pada PBPU meningkat pada usia ≥ 43 tahun ($b=5.03$; CI 95%= 2.90-6.61; <0.001), jenis kelamin laki-laki ($b=6.18$; CI 95%= 3.12-7.19; $p<0.001$), tingkat pendidikan \geq SMA ($b=3.10$; CI 95%= 0.96-4.31; $p=0.002$).

Saran

Diharapkan Pemerintah Pusat dapat mengkaji ulang terkait kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Diharapkan BPJS Kesehatan dapat meningkatkan upaya menjangkau kepesertaan melalui sosialisasi dan promosi secara intensif.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. (2020). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020. *Jakarta*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. (2018). *Kudus dalam Angka 2018*.

Kudus.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2020). Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Februari 2020. *Semarang*.

Dedy, I. P., Hardy, K., Luh, N., Ari, G., & Yudha, N. (2018). Kemauan Dan Kemampuan Membayar (Ability-Willingness to Pay) Dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Sektor Informal Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Denpasar 2017. *Jurnal Kesehatan Terpadu*, 2(2).

Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2020). *Cakupan Kepesertaan 2020*.

Intiasari, A. D., Trisnantoro, L., & Hendrartini, J. (2015). Potret Masyarakat Sektor Informal di Indonesia: Kesehatan Sebagai Upaya Perluasan Kepesertaan pada Skema Non PBI Mandiri. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 4(4), 126–132.

Kofoworola, Y., Id, O., Akomolafe, B., & Ohiri, K. (2019). Factors Influencing Willingness and Ability To Pay for Social Health Insurance in Nigeria. *PloS One*, 14(8), 1-10.

Lesmana, T. C., & Sugiman, S. (2020). Determinan Pemilihan Kelas BPJS Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri. *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 5(2), 216–226.

Mathauer, I., Schmidt, J., & Wenyaa, M. (2008). Extending Social Health Insurance To The Informal Sector in Kenya. An Assessment of Factors Affecting Demand. *The International Journal of Health Planning and*



Management, 23(1), 51–68.

- Minyihun, A., Gebregziabher, M. G., & Gelaw, Y. A. (2019). Willingness To Pay for Community-Based Health Insurance and Associated Factors Among Rural Households of Bugna District, Northeast Ethiopia. *BMC Research Notes*, 12(1), 55.
- Niha, M. R., Korompis, G. E. C., & Mandagi, C. K. F. (2019). Hubungan Karakteristik Individu Dan Pengetahuan Tentang Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (Jkn-Kis) Dengan Status Kepesertaan Masyarakat Dalam Program Jkn-Kis Di Kecamatan Singkil Kota Manado. *Kesehatan Masyarakat*, 7(5).
- Noerdjoedianto, D. (2015). Kajian Ability To Pay (Atp) Bagi Calon Peserta Bpjs Kesehatan Dalam Pemilihan Besar-an Iuran Di Propinsi Jambi Tahun 2015. *Jambi Medical Journal*, 4(2).
- Nosratnejad, S., Rashidian, A., & Dror, D. M. (2016). Systematic Review of Willingness To Pay For Health Insurance In Low and Middle Income Countries. *PloS One*, 11(6), 1-14.
- Pemerintah Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Prasetyo, B. (2016). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Mandiri pada Masyarakat Kelurahan Tanjung Puri tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan: Wawasan Kesehatan*, 3(1), 81–89.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan*.
- Rhoza, N., Mahwati, Y., & Asih, T. N. (2016). Faktor-Faktor yang berhubungan dengan Pengambilan (JKN) di Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 8(2)(80–84).
- Yunianti, A. D. (2018). Willingness To Pay Timbangan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018. *Universitas Sriwijaya*.